

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 4



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media : Radar Sampit ✓ Halaman : 12

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabungan

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BPK Perwakilan Kalteng Terima LKPD 2023



LAPORAN KEUANGAN: Penjabat Bupati Kobar Budi Santosa menyerahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK perwakilan Kalteng di Palangkaraya, Jumat (15/3).

Pemkab Kobar Optimis Pertahankan Opini WTP

PANGKALAN BUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023. LKPD diserahkan langsung oleh Pj Bupati Kobar Budi Santosa di gedung BPK Perwakilan Kalteng di Palangka Raya.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Kalteng juga telah melakukan audit pendahuluan atas LKPD 2023. Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa menyampaikan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses audit pendahuluan. Penyerahan laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : Radar Sampit ✓ Halaman : 12

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabengan

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

"Kami berkeyakinan audit yang dilakukan BPK Perwakilan Kalteng untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peraturan, juga penting untuk meningkatkan opini yang diraih menjadi lebih berkualitas," ujarnya.

Budi Santosa berkeyakinan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah daerah harus selalu beradaptasi, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah juga harus terus memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola keuangan.

"Pelaksanaan keuangan daerah yang dipercayakan harus dikelola dengan baik dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat," pungkasnya. (tyo/yit)